



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU
TERHADAP PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI
PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

FEBRIKA YUNI MAHARANI

NIM. 11624200478

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1442 H/2021 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam Melakukan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah"**
yang ditulis oleh:

Nama : **FEBRIKA YUNI MAHARANI**

NIM : **11624200478**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Sofia Hardani, M. Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU TERHADAP PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **FEBRIKA YUNI MAHARANI**
 NIM : 11624200478
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 06 Februari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Muslim, SH., M.Hum

Penguji I
Joni Alizon, MH

Penguji II
Dr. Muhammad Darwis, MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005



Febrika Yuni Maharani (2021) : Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. Salah satu tugas dari BPN adalah melakukan penertiban tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Penelitian ini bermaksud mengungkap upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau, kendala BPN Provinsi Riau dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar, dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap upaya BPN Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari BPN Provinsi Riau, dan data sekunder yang mendukung data primer bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Lalu dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode deskriptif analisis.

Dari penelitian ini dapat diungkapkan bahwa upaya BPN Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar. Akan tetapi, upaya tersebut dirasa belum optimal karena sebanyak 34 lokasi tanah terindikasi terlantar baru 1 lokasi yang berhasil ditetapkan sebagai tanah terlantar yakni PT. Alfa Glory Indah. Selain itu, BPN Provinsi Riau belum sanggup untuk mengatasi kendala-kendala baik kendala *intern* maupun kendala *ekstern* yang menghambat proses penertiban tanah terlantar. Menurut *fiqh siyasah*, upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau tersebut termasuk ke dalam *fiqh siyasah dusturiyah* yang merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-haknya yang wajib dilindungi. Di dalamnya terdapat *wazir* yang merupakan pembantu khalifah dalam menangani urusan pemerintahan. *Wazir* terbagi menjadi 2 (dua) yakni *wazir tafwidzi* dan *wazir tanfidzi*. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat disamakan kedudukannya dengan *wazir tanfidzi* yang merupakan pembantu khalifah di bidang administrasi. Dalam Islam, tanah terlantar atau mati disebut *al-ard al-mawat*. Sedangkan proses penertiban tanah mati diberi waktu 3 tahun setelah tanah tersebut diberikan oleh pemerintah (*iqta'*) untuk dikelola atau diurus oleh pemegang hak.

Kata Kunci : Upaya , Tanah Terlantar, Badan Pertanahan Nasional (BPN)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, (Alm.) Bapak Muhadi dan Ibu Siti Komariah yang senantiasa memberikan do’a dan dorongan moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini. Dan Masku Aldi Hutama Putra, serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Drs. Promadi, MA, Ph.D, selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. Hajar M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Rahman Alwi M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Penulis sangat berterimakasih atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
6. Pimpinan Pustaka Ibu Rasdanelis, S.Ag., SS, M.Hum dan seluruh staf perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis mengakses buku-buku, jurnal maupun skripsi sebagai sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Asmiwati, Dra., M.A selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Seluruh Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kepada sahabat terbaikku, khususnya “Tiga Serangkai” yakni Hani Mulyani dan Torisna Yulizar serta Rendi Meidi Setiawan, Irma Novera, Cici Khairani, dan Novialismarni yang selalu memotivasi dan memberikan bantuannya selama masa perkuliahan. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, “Keluarga HTN Siyasah ’16” beserta Keluarga Besar HTN Siyasah.
11. Dan semua pihak yang ikut membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana serta ilmu yang penulis miliki. *Jazakumullah khairan katsiron*, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal ‘alamin*.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Februari 2021

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Subyek dan Obyek Penelitian	13
4. Sumber dan Jenis Data.....	13
5. Metode Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	14
7. Metode Penulisan.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Provinsi Riau	17
B. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Sejarah Berdirinya	20
3. Dasar Hukum	25
4. Lokasi.....	26
5. Susunan Organisasi	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mekanisme Kerja	28
7. Tugas dan Fungsi	30
8. Visi dan Misi	31
9. Program Kerja	32

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian-Pengertian.....	35
1. Upaya dan Penertiban	35
2. Tanah Terlantar	36
3. Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	43
4. Wizarah.....	48
B. Dasar Hukum Wazir	52
C. Wazir Tanfizi	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau.....	58
B. Kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam Melaksanakan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau.....	69
C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR KEPUSTAKAAN	93
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Pembagian Administratif Provinsi Riau	19
TABEL IV.1	Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar	
	Tahun 2020	58
TABEL IV.2	Jumlah Tanah Terindikasi Terlantar yang Tercatat	
	dalam Data Base.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Adapun firman Allah pada al-Qur'an telah dijelaskan dalam surah al-A'raf ayat 128 yang berbunyi:

قَالْمُوسَىٰ قَوْمِ هَاسِتُ عَيْنُو بِاللّٰهِ وَاصْبِرُو ۖ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

Artinya: Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".²

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sekaligus menggunakan kekayaan alam yang telah disediakan sesuai sifatnya. Hal tersebut dikarenakan agar kekayaan alam yang tercipta tidak terdapat unsur terabaikan dan menciptakan rasa kemakmuran bagi

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 1

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-Juz 30*, (Banten: Kalim, 2016), h. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masyarakat sekitar dengan cara memanfaatkan sesuai kadarnya. Hal ini dapat diumpamakan benda berupa tanah.³

Sebagai alas hidup manusia, tanah menempati posisi yang vital, atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan dan tidak dapat diperbaharui kembali, maka pengaturan penguasaan tanah sangatlah penting.⁴ Falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis, tetapi lebih bersifat kolektif dengan tetap memberikan tempat serta penghormatan terhadap hak perseorangan. Hak-hak perorangan atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi selalu ada batasnya, yakni kepentingan orang lain, masyarakat atau negara. Dengan demikian, penguasaan dan penggunaan tanah harus dilakukan secara wajar dan bertanggung jawab. Ada pertanggungjawaban individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya kepentingan bersama/kepentingan umum, karena manusia tidak dapat berkembang sepenuhnya apabila berada di luar keanggotaan suatu masyarakat. Konsep hubungan ini sesuai dengan Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa, “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”⁵

³ *Ibid.*

⁴ Noer Fauzi, *Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 5

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), h. 181-182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Maksud dari tanah mempunyai fungsi sosial terdapat dalam penjelasan UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada masyarakat. UUPA mengamanatkan adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan tercapai kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Dalam pengaturannya, negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberian haknya. Oleh karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika pemegang hak menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya yakni dihapuskannya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.⁶

Adapun yang dimaksud dengan tanah terlantar ialah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya

⁶Ulfia Hasanah, *Redistribusi Tanah Terlantar di Propinsi Riau*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 3, September 2014-Januari 2015, h. 139-140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.⁷ Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, serta memperkuat harmoni sosial. Selain itu, optimalisasi pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.⁸

Guna menjamin pengelolaan tanah dengan baik, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mempunyai wewenang khusus menangani permasalahan pertanahan, Maka dari itu dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara khusus BPN mempunyai tugas memberikan kepastian hukum pengelolaan tanah oleh warga negara dalam berbagai jenis hak kepemilikan untuk dapat diberdayagunakan sebagaimana mestinya. BPN adalah lembaga pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor

⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar



Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015.⁹

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, persoalan ini berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁰ Di dalamnya terdapat *wizarah* yang merupakan nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau pemerintahan. Kata “*wizarah*” diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. *Wazir* berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.¹¹

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga

⁹ Zaki Ulya, *Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 4, 6 Mei 2016, h. 505-506

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 47

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

dan pikiran *wazir*, sehingga persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.¹²

Al-Mawardi membedakan *wizarah* menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Akan tetapi, *wazir al-tafwidh* ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. *Wazir* kedua, *wazir tanfidz* hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari *wazir tafwidh*. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara, *wazir tanfidz* juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini hanyalah penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir tanfidz* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.¹³ Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan *wazir tanfidz* karena BPN merupakan lembaga pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang serta sebagai penghubung antara kepala negara dengan rakyat dalam hal pertanahan.

¹² *Ibid.*, h. 167

¹³ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 169-170

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dalam Islam dikenal istilah *Ihya' al-Mawat* yaitu menghidupkan kembali lahan yang mati. Menurut Imam Syafi'i, lahan yang mati adalah setiap lahan yang tidak digarap meskipun lahan tersebut menyatu dengan lahan yang digarap.¹⁴ Tanah mawat tersebut harus ditertibkan dan setelah itu baru bisa dimanfaatkan. Penertiban dimaksudkan sebagai tindakan hukum pencabutan atau pengambilan kembali tanah mawat yang sudah diberikan pada seseorang. Tanah yang dijadikan sasaran penertiban dalam hukum Islam adalah tanah mawat yang boleh diusahakan, artinya tanah yang tidak pernah dimiliki oleh seseorang, yang tidak ada kesan penggunaannya. Tanah mawat yang tidak dimiliki seseorang ini disebut tanah-tanah sawafi, yakni sejenis tanah yang diletakkan di bawah kekuasaan dan pengawasan pemerintah.¹⁵

Mengenai penertiban tanah mawat menurut Hukum Islam, dapat dipahami dengan mengemukakan suatu prinsip pencabutan hak milik atas tanah-tanah sawafi, seperti dijelaskan Ridzuan Awang yakni tanah-tanah sawafi yang telah diberi milik (*iqta'*) oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu untuk diusahakan dan dimakmurkan. Tanah-tanah ini juga sekiranya tidak dimajukan dalam masa tiga tahun atau menjadi terbiar selepas tempo tiga tahun itu, maka pemerintah boleh mengambil kembali dari pemiliknya atau memberi milik tanah kepada orang lain. Dan pengambilan kembali ini dilakukan tanpa pembayaran biaya perampasan. Demikian

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa oleh Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), Cet. Ke-2, h. 313

¹⁵ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum Volume XIII, No. 55, Desember 2011, h. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

juga jika pemilik tanah tidak mampu dan tidak mempunyai upaya untuk mengusahakan dan membangun tanahnya dengan alasan tanah tersebut terlalu luas. Maka pemerintah boleh mengambil kembali kadar kekuasaan itu dan diberikan milik kepada orang lain.¹⁶

Penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Pencegahan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).¹⁷ Maka dari itu, diperlukanlah kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan Kaidah Fiqh Siyash yakni:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang imam terhadap rakyatnya harus berlandaskan kemaslahatan.”¹⁸

Lokasi tanah terindikasi terlantar ini ditemukan hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Dari data yang diperoleh pada tahun 2019, jumlah tanah terindikasi terlantar mencapai 34 lokasi. Namun, sampai saat ini (Januari 2020) Kantor BPN RI

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Saripudin, *Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No. 22, Agustus 2015, h. 114

¹⁸ Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 124

baru mengeluarkan 1 (satu) SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10/PTT/BPN RI/2012 tentang penetapan tanah terlantar atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 03 nama PT. Alfa Glory Indah yang terletak di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Adapun upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar diantaranya ialah Inventarisasi tanah terindikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, Peringatan terhadap pemegang hak, dan Penetapan tanah terlantar.¹⁹ Dalam melakukan penertiban tanah terlantar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau mengalami beberapa kendala baik dari dalam pihak BPN (*intern*) maupun dari masyarakat atau lapangan (*ekstern*). Kendala dari pihak BPN sendiri diantaranya ialah Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk turun langsung ke lapangan. Dikarenakan banyaknya jumlah tanah terindikasi terlantar, sehingga membutuhkan SDM yang memadai. Selain itu, masalah biaya juga menjadi kendala dalam melakukan penertiban tanah terlantar. Semakin luas tanah yang terlantar, maka biayanya semakin besar. Sedangkan kendala dari luar (masyarakat atau lapangan) diantaranya lokasi yang sulit dijangkau, terjadinya konflik masyarakat dan tidak adanya informasi atau laporan dari kantor pertanahan maupun masyarakat. Adapun contoh kasusnya yaitu ada lahan milik PT, namun ada masyarakat yang mengklaim tanah tersebut padahal PT itu telah mendapatkan sertifikat atas tanah. Di sisi lain, BPN tidak bisa melakukan penertiban terhadap tanah

¹⁹ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang dimaksud dikarenakan adanya konflik masyarakat. Berdasarkan contoh kasus di atas maka penulis tertarik untuk untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanah yang terindikasi terlantar berupa upaya atau tata cara penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU TERHADAP PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau serta kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau dalam perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan penelitian dari permasalahan yang akan dikaji, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui kendala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui tinjauan siyasah terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau.

- Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan, menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi tentang upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat dari narasumber melalui wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien, No. 5, Sukajadi, Provinsi Riau. Selain itu, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan tersebut.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau beserta staf di lingkungannya.
- b. Yang menjadi obyek penelitian ini adalah Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian. Sumber data dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau obyeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan Membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Wawancara yaitu Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau.
- b) Studi Kepustakaan yaitu menggunakan dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (jurnal), yang relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²²

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

²²*Ibid.*, h. 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Provinsi Riau dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau yang diantaranya meliputi sejarah berdirinya, dasar hukum, lokasi, susunan organisasi, mekanisme kerja, tugas dan fungsi, visi misi dan program kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian yang terdiri dari pengertian upaya dan penertiban, tanah terlantar, *fiqh siyasah dusturiyah*, dan *wizarah*. Selain itu, juga membahas mengenai dasar hukum *wazir* dan tentang *wazir tanfidzi*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab inti yang mana pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap penertiban tanah terlantar, kendala BPN Provinsi Riau dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau dan upaya BPN terhadap penertiban tanah terlantar di Provinsi Riau perspektif *fiqh siyasah*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian tentang hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yakni di sepanjang pesisir Selat Melaka. Terbentuk pada 9 Agustus 1957 dan memiliki luas wilayah sebesar 87.023,66 km². Provinsi Riau berbatasan langsung dengan daerah:

- a) Di sebelah Utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka;
- b) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala;
- c) Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau);
- d) Di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.²³

Berikut ini akan disajikan tabel tentang pembagian administratif Provinsi Riau sebagai berikut²⁴:

²³<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25/12/2020 pukul 22.28

²⁴<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25/12/2020 pukul 23. 10

Tabel II.1 Pembagian Administratif Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kecamatan	Kelurah an/Desa
1	Kabupatesn Bengkalis	Bengkalis	6.975,41	537.142	11	19/136
2	Kabupaten Indragiri Hilir	Tembilah An	12.614,7 8	616.347	20	39/197
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Rengat	7.723,80	421.922	14	16/178
4	Kabupaten Kampar	Bangkinang	10.983,4 7	740.839	21	8/242
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	Selatpanjang	3.707,84	206.611	9	5/96
6	Kabupaten Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	5.259,36	326.266	15	11/218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Kabupaten Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12.758,4 5	365.817	12	14/104
8	Kabupaten Rokan Hilir	Bagansiapiapi	8.881,59	631.238	15	25/159
9	Kabupaten Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	7.588,13	553.095	16	6/139
10	Kabupaten Siak	Siak Indrapura	8.275,18	415.128	14	9/122
11	Kota Dumai	-	1.623,38	280.174	7	33/-
12	Kota Pekanbaru	-	632,27	886.226	12	83/-

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota diantaranya Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan terdapat 166 Kecamatan, 268 Kelurahan dan 1.591 desa di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan memiliki wilayah yang lebih luas dari yang lainnya. Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Pekanbaru. Berdasarkan tabel di atas, daerah dengan penduduk terpadat adalah Kota Pekanbaru



yakni 886.226 jiwa dan yang kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 206.611 jiwa.

B. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau

1. Pengertian

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁵ BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN RI dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN sendiri diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.²⁶

2. Sejarah Berdirinya Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal kelembagaan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan Kementerian Agraria, sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ke tingkat Kantah. Disamping itu, secara kelembagaan Badan Pertanahan

²⁵ Pasal 1 Perpres RI Nomor 20 Tahun 2015

²⁶ *Ibid.*

Nasional (BPN) mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.²⁷

Untuk mengetahui perubahan tersebut akan dijelaskan di bawah ini terkait dengan sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yakni:

a. Tahun 1960 – 1970

- **Tahun 1960**

Pada awal berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.

- **Tahun 1965**

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agrarian dipimpin oleh R. Hermanses, S. H.

- Tahun 1968

Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan. Pada saat itu dimasukkan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal

²⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, diakses pada tanggal 20 November 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agrarian. Selama periode 1968-1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan.

b. Tahun 1988-1990

Pada periode ini kembali mengalami perubahan, lembaga yang menangani urusan agrarian dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir. Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya. Pada saat itu terjadi perubahan yang sangat signifikan karena merupakan awal terbentuknya Badan Pertanahan Nasional.

c. Tahun 1990-Sekarang

• Tahun 1990

Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri negara agraria/ badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir. Soni Harsono. Pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

• Tahun 1998

Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Perubahan yang terjadi hanya pada puncak pimpinan saja yakni Ir. Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Tahun 2002-2006**

Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting. Pada saat itu Badan Pertanahan Nasional dijadikan sebagai lembaga negara. Kedudukannya sejajar dengan kementerian. Pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph. D

- **Tahun 2006-2012**

Pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph. D. Dengan 11 agenda kebijakannya, dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format sebelumnya. Adapun 11 (sebelas) agenda kebijakannya meliputi:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (*land tenure*).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum, dan kebijakan Pertanahan.

• **Tahun 2012-2014**

Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto.

• **Tahun 2014-sekarang**

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dijabat oleh Sofyan Djalil.²⁸

²⁸*Ibid.*



3. Dasar Hukum

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai kedudukan dari Badan Pertanahan Nasional:

“BPN RI berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden perihal permasalahan pertanahan.”

Jadi, dapat diartikan juga bahwa BPN RI merupakan perantara pemerintah dengan rakyat dalam hal pertanahan. Dengan adanya BPN diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pertanahan khususnya dalam melaksanakan penertiban tanah terlantar. Dalam Perpres tersebut termuat secara rinci mengenai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang meliputi Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan lain-lain.

Sedangkan aturan yang memuat mengenai penertiban tanah terlantar secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam PP ini dijelaskan juga tentang Objek Penertiban Tanah Terlantar, langkah-langkah dalam melakukan penertiban tanah terlantar, dan lain-lain. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stae Isam University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanah Terlantar. Di Perkaban ini, termuat dengan jelas penjabaran tentang tata cara penertiban tanah terlantar itu sendiri.²⁹

4. Lokasi

Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau terletak di Jalan Cut Nyak Dien No.5, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Adapun No.Telp. (0761) 23002, Fak. (0761) 21780.

5. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, Struktur organisasi BPN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- d. Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan;
- f. Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- g. Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan; dan
- h. Inspektorat Utama.³⁰

²⁹ Perkaban Nomor 4 Tahun 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sedangkan Bagan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, sebagai berikut:

1) Bagian Tata Usaha :

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Organisasi dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan dan BMN

Subbagian Umum dan Informasi

2) Bidang :

a) Bidang Infrastruktur Pertanahan, terdiri atas:

- Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
- Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadatral
- Seksi Survei dan Pemetaan Tematik

b) Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, meliputi:

- Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat
- Seksi Pendaftaran Hak Tanah
- Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT

c) Bidang Penataan Pertanahan, meliputi:

- Seksi Penatagunaan Tanah
- Seksi Landaform dan Konsolidasi Tanah
- Seksi Penataan Kawasan Tertentu

³⁰Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d) Bidang Pengadaan Tanah, meliputi:
 - Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah
 - Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
 - Seksi Penilaian Tanah
 - e) Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, meliputi:
 - Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
 - Seksi Penanganan Perkara Pertanahan
 - Seksi Pengendalian , Penertiban, dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Tertentu.³¹

6. Mekanisme Kerja

Terkait mekanisme kerja dari BPN, telah dijelaskan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pada Bab V tentang Tata Kerja sebagai berikut:

Pasal 9 : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPN harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPN.

³¹ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pasal 10 : Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan secara berskala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 11 : BPN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPN.

Pasal 12 : Setiap unsur di lingkungan BPN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 13: Setiap pemimpin unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian *intern* pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 : Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15 : Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pasal 16 : Setiap pemimpin unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17 : Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

7. Tugas dan Fungsi

Tugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² Adapun dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran, dan pemetaan
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah

³² Pasal 2 PerPres RI Nomor 20 Tahun 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.³³

8. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia.

b. Misi

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan digunakan untuk:

³³Pasal 3 Perpres Nomor 20 Tahun 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Memperkuat lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.³⁴

9. Program Kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau

Dalam melaksanakan fungsinya BPN menjalankan beberapa program pertanahan, antara lain:

³⁴<https://jdih.atrbpn.go.id/>, diakses pada 11/01/2021 pukul 23:05



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prona merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan dengan cara pensertifikatkan tanah secara massal untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.

Redistribusi, dalam hal ini tanah, merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara yang diberikan kepada pihak yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi rakyat.

IP4T adalah singkatan dari Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah yang merupakan kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.

SMS merupakan akronim dari Sertifikat Massal Swadaya. Definisi dari SMS adalah program pendaftaran tanah yang termasuk dalam kategori pendaftaran tanah sistematis.

Pertanian

UKM merupakan akronim dari Usaha Kecil dan Menengah. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat.

Rutin.³⁵



³⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, diakses pada 11/01/2021 pukul 22:58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian-pengertian

1. Upaya dan Penertiban

Sebelum penulis menjabarkan tentang upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka terlebih dahulu membahas tentang pengertian upaya dan penertiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya.³⁶ Adapun pengertian Upaya menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Wahyu Baskoro mengemukakan bahwa Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar).³⁷
- b. Torsina menyatakan bahwa Upaya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Sriyanto mengatakan bahwa Upaya ialah usaha untuk mencapai sesuatu yaitu segala usaha agar tidak terjadi kerusakan.³⁸

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1595

³⁷ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Setia Kawan, 2005), h. 902

³⁸ Fatta Nur Ardiansyah, Skripsi: "*Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin dan Beku di MV Meratus Medan I*", (Semarang, PIP, 2017), h. 8-9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penertiban yang berasal dari kata “tertib” adalah teratur; menurut aturan; rapi; dengan sepatutnya; aturan; peraturan yang baik. Penertiban itu sendiri berarti proses; cara; perbuatan; dan menertibkan.³⁹ Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang dibutuhkan dalam suatu Negara atau daerah. Penertiban tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi Negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tanah Terlantar

Tanah terlantar berasal dari dua kata yaitu “tanah” dan “terlantar”. Tanah merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah berarti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; daratan; permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu Negara; bahan-bahan dari bumi; dasar.⁴⁰

Sedangkan “terlantar” merupakan tanah yang tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak diurus, tidak dikerjakan, terbengkalai, tanah kosong/tidur.⁴¹ Maka dapat disimpulkan, bahwa tanah terlantar ialah tanah yang tidak diusahakan, tidak

³⁹Ibid., h. 1512

⁴⁰Ibid., h. 1433

⁴¹Dian Aries Mujiburohman, *loc. cit.*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Definisi ini sejalan dengan penjelasan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang berbunyi: “Tanah terlantar ialah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”⁴²

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Hak milik dapat berlangsung secara terus menerus, diwariskan dari satu orang ke orang lainnya yang memenuhi syarat sebagai ahli waris, tidak memiliki jangka waktu, tidak mudah dihapus, dan mudah dipertahankan.⁴³

Yang kedua, Hak Guna Usaha (HGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh pemerintah guna kepentingan usaha seperti pertanian dan perkebunan. Sedangkan, Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Selanjutnya, Hak Pakai yang merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Sedangkan

⁴² Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

⁴³ *Ibid.*, h. 72-73

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

yang dimaksud dengan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.⁴⁴

Tanah terlantar dalam hukum adat memiliki pengertian tanah liar “*de woeste gronden*” dengan tanah kosong “*domein verklaring*”. Adapun bunyinya adalah, “*landsdomein is alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen*” (domein negara adalah semua tanah yang mana di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak *eigendom* oleh seseorang).⁴⁵

Setelah menghapus prinsip *domain*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa UUPA sebagai hukum agraria yang baru mengakui adat sebagai sumber hukum dan anti terhadap penelantaran tanah (membiarkan tanah menjadi kosong).⁴⁶ Hukum adat dijadikan dasar hukum dikarenakan dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia sehingga kedudukannya istimewa dalam pembentukan hukum agraria.⁴⁷

Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat disebut dengan “*hak ulayat*”. Menurut Achmad Sodiki, konsep penguasaan tanah berlaku pada masyarakat tradisional salah satunya adalah hak ulayat, yaitu suara hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah, yakni hak yang lahir karena

⁴⁴ *Ibid.*, h. 77-78

⁴⁵ Dian Aries Mujiburohman, *op. cit.*, h.30

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah kosong. Menurut Muchsin mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, misalnya tanah.⁴⁸

Dari pengertian tersebut, didapat sebuah kesimpulan bahwa, menurut hukum adat tanah dikatakan telah ditelantarkan jika kriterianya adalah tanah telah dengan sengaja tidak dikerjakan oleh penggarapnya/pemilikinya dalam waktu tertentu. Untuk menentukan sudah ditelantarkan tidak digantungkan pada jangka waktu tertentu tetapi hanya dengan melihat kenyataan jika tanah dibiarkan membelukar kembali karena sudah tidak untuk ditanami kembali. Hal ini sudah dapat dikualifikasi sebagai tanah yang telah ditelantarkan.⁴⁹

Dalam Islam dikenal lembaga tanah terlantar yang bernama *ardh al-mawaat*. Tanah berasal dari kata *ardh*, jamaknya *aradhum*, *aradh* dan *arudh*. Secara etimologis, *ardh* berarti “bumi”, tanah, daratan (lawan lautan). Sedangkan *mawaat* berasal dari kata “*mawaatun*, *yamutu*”, artinya sunyi dari perkampungan dan penduduk, tidak ada ruh padanya, tidak ada penduduk atau tidak pernah dimanfaatkan orang. Maka jika dirangkaikan, “*ardh al-mawaat*” secara lugat artinya ialah bumi mati/tanah mati.⁵⁰ Jadi, tanah mati/terlantar dalam Islam ialah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara selama 3 (tiga) tahun tidak digarap dan tidak

⁴⁸*Ibid.*, h. 31

⁴⁹*Ibid.*, h. 34

⁵⁰Dian Aries Mujiburohman, *op. cit.*, h. 35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dimanfaatkan, kembali menjadi penguasaan Negara dan diputuskan hubungan hukum dengan pemegang hak.⁵¹

Pengertian tanah terlantar berdasarkan yurisprudensi dapat dilihat dalam pendapat Hakim dalam putusan-putusannya untuk memutus mengenai kasus-kasus lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan dengan iktikad baik, dalam hukum adat dikenal dengan lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya.⁵²

Adapun kriteria-kriteria tanah terlantar meliputi:

1) Kriteria tanah terlantar menurut hukum meliputi:

- a. Adanya pemilik atau orang yang memiliki hak atas tanah tersebut (subyek).
- b. Adanya tanah atas Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, yang secara sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang hak.
- c. Adanya tanah atas Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, yang dipergunakan namun tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

⁵¹ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h. 19

⁵² *Ibid.*, h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ada jangka waktu tertentu yakni dihitung dari 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya Hak atas Tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai atau sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang.⁵³
- e. Tidak termasuk tanah terlantar adalah:
 - Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan
 - Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.⁵⁴

2) Kriteria tanah terlantar menurut Hukum Adat

- a. Keadaan fisik tanah yang pernah dibuka, kemudian dibiarkan tidak diurus/dirawat oleh pemiliknya sehingga tanah tersebut ditumbuhi alang-alang. Apalagi jika tanah tersebut ternyata dikelilingi oleh tanah-tanah yang ditanami kepunyaan teman-teman pemegang hak.

⁵³ Eko Yulinggar Permana, *Peralihan Hak atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Kasus terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-HGU/BPN RI/2012*, Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 Februari 2015, h. 9-10

⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk kasus tersebut orang yang mengerjakan tanah dengan tanpa izin dari pemilik tanah bukan berarti hendak menimbulkan hak baru tetapi agar tanah tersebut produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama-sama keluarganya.
- c. Jika terjadi tanah terlantar, harus diikuti tindakan pemberdayaan agar bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi tanah terlantar.

Berdasarkan karakter terlantarnya, sebidang tanah dapat dikatakan sebagai tanah terantar apabila:

- a. Tanah (sawah, tegalan, lading) yang sudah pernah dibuka dengan ciri-ciri:
 - Satu kali panen
 - Belum lama dibuka lalu ditinggalkan
 - Sebidang tanah yang telah menjadi semak belukar
 - Batas-batas tanah garapan tidak jelas lagi
 - Jangka waktu ditinggalkan dua musim : 10-15 tahun; 3 tahun; beberapa waktu
- b. Ditinggalkan oleh pemiliknya dan atau penggarapnya
- c. Kembali kepada hak ulayatnya/masyarakat adat
- d. Tanah kembali tanpa pemilik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3) Kriteria tanah terlantar menurut Hukum Islam

- a. Tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak ada hak milik atasnya, baik hak milik seseorang Muslim maupun hak milik seseorang non-Muslim.
- b. Tanah yang tidak digarap. Lahan yang tidak digarap/dikerjakan dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut dengan pemagaran, bekas penggarapan dan tanda-tanda lainnya yang biasanya dipakai masyarakat setempat.
- c. Tanah yang berada di luar (jauh) dari permukiman.⁵⁵

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata fiqh berasal dari kata “*fahm*” berarti “paham yang mendalam” (*al-fahmu al-amiq*). Secara terminologi, fiqh diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil yang tafshil dalam nash (al-Qur’an dan Hadist).⁵⁶ Definisi itu berbunyi:⁵⁷

التفصيلية إدا انتهمنا المكتسب العملية الشرعية الاحكام

“*Hukum-hukum syar’i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci.*”

⁵⁵Supriyanto, “Kriteria Tanah Terlantar”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No.1, Januari 2010, h. 55

⁵⁶Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, (Medan: Citapustaka Media, 2015), h. 4-5

⁵⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berikut ini merupakan definisi fiqh menurut para ahli:

1. Al-Utsaimin

التَّفْصِيلِيَّةُ بِأَدْلَتِهَا الْعَمَلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْأَحْكَامِ مَعْرِفَةُ

“Mengetahui hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyyah dengan dalil-dalilnya yang terperinci.”⁵⁸

2. Az-Zarkasyi

التَّفْصِيلِيَّةُ بِأَدْلَتِهَا الْمَكْتَسَبُ الْعَمَلِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الْأَحْكَامِ الْعِلْمُ

“Ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.”⁵⁹

3. Imam al-Haramain

هُوَ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ الْعَقْلِيَّةِ

”Adalah ilmu tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara syar’i bukan secara akal.”⁶⁰

⁵⁸Adam Rizkala, “Pengertian Fiqh Menurut Para Ulama dan Keutamaannya”, <https://www.nasehatquran.com/2019/05/pengertian-fiqh-menurut-para-ulama.html>, diakses pada 16/12/2020 pukul 20:31

⁵⁹Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Penerbit Buku Pena Salsabila, 2019), h.

2

⁶⁰*loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kata “*siyasah*” berasal dari kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dapat diketahui bahwa tujuan dari *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶¹ Sedangkan menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi, definisi dari *siyasah* adalah:

الشرع وفقه العباد مصلحتهم

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.”⁶²

Menurut Ibn ‘aqil, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan:

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وان لم يكن بسرعه الرسول ولا نزل به وحى

“*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.”⁶³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah* ialah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”

Di sisi lain, Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* yakni “membuat

⁶¹ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 3-4

⁶² Djazuli, *op. cit.*, h. 26

⁶³ *Ibid.*, h. 27

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Sementara Ibn Manzbur mendefinisikan *siyasah* dengan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”⁶⁴

Adapun menurut Abdurrahman, *siyasah* ialah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam pemerintahan, hukum, peradilan, lembaga pelaksanaan, administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain. Maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan guna mencapai kemaslahatan rakyat.⁶⁵ *Fiqh Siyasah* secara garis besar terbagi menjadi empat bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Dauliyah* dan *Siyasah harbiyah*.⁶⁶

Siyasah Dusturiyah terdiri dari dua kata yaitu “*siyasah*” dan “*dusturiyah*”. Pengertian *siyasah* sudah cukup dijelaskan di atas, adapun pengertian dari *dusturiyah* yakni undang-undang atau peraturan. Jadi, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁶⁷

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 4

⁶⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39

⁶⁶ 4 (empat) pembagian *fiqh siyasah* meliputi: *Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Dauliyah*, dan *Siyasah Harbiyah*. *Siyasah Dusturiyah* ialah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan rakyat. *Siyasah Maliyah* ialah pemerintahan yang mengatur tentang keuangan Negara. *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur Negara dalam hal hubungan internasional dan kedaulatan Negara. Sedangkan *Siyasah Harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.

⁶⁷ Djazuli, *op. cit.*, h. 47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasir

Sumber fiqh *Dusturiyah* yang pertama adalah Al-Qur'an yakni ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Yang kedua adalah Hadis terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum di Negeri Arab. Dalam hal ini, harus lebih banyak dilihat semangatnya, karena hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat di bidang ilmu (pengetahuan) maupun teknologi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

والنياتوالعواعدوالأحوالوالأمنكةالأزمنةبتغير الأحكامتغير

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat.”⁶⁸

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun masing-masing memiliki perbedaan dalam mengatur pemerintahan, tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yakni berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan kaidah fiqh siyash:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakannya imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat.”⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, h. 53

⁶⁹ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, dalam menangani masalah *fiqh dusturiyah*. Hasil dari ijtihad para ulama ini sangatlah membantu dalam memahami *fiqh dusturiyah* dan prinsip-prinsipnya. Untuk mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Hal ini berhubungan dengan *Maqasid Syariah* yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Sumber terakhir dari *fiqh dusturi* adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Terdapat kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering disebut dengan konveksi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis.⁷⁰

4. Wizarah

Kata “wizarah” diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam

⁷⁰*Ibid.*, h. 54

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

pemerintahan. *Wazir* berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁷¹

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*. Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁷² Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas terdapat dalam Al-Qur'an, ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. At-Thaha : 29-32, sebagai berikut:⁷³

وَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (٣٦) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٧)

⁷¹ Muhammad Iqbal, *loc. cit.*

⁷² *Ibid.*, h. 167

⁷³ Djazuli, *loc. cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku, 31. teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, 32. dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku.⁷⁴

Al-Mawardi membedakan *wizarah* menjadi dua bentuk, yaitu *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidz*. *Wazir al-tafwidh* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Akan tetapi, *wazir al-tafwidh* ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Wazir kedua yakni, *wazir tanfidz* hanyalah pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dari *wazir tafwidh*. Meskipun demikian, sebagai pembantu kepala negara, *wazir tanfidz* juga dapat menyampaikan saran dan pandangan untuk kepala negara. Dengan kata lain, *wazir* ini hanyalah penghubung antara kepala negara dan rakyat. *Wazir tanfidz* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidh* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.⁷⁵

Untuk menduduki jabatan *wazir*, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat-syarat ditetapkan oleh seorang imam (khalifah) yaitu amanah, jujur, tidak materialistik, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak mengikuti hawa nafsu, kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). *Wazir*

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Kalim, 2016), h. 314

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pelaksana ide dan ijtihad, sehingga ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Selain itu, ia harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Adapun bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ia baru dianggap sah untuk diangkat menjadi *wazir* jika ada pernyataan resmi dari imam (khalifah). Karena *wazir* merupakan jabatan yang membutuhkan akad dan sebuah akad tidak sah tanpa adanya pernyataan yang jelas. Jika imam (khalifah) mengangkat seorang *wazir* berdasarkan pertimbangannya semata, secara hukum pengangkatan tersebut tidak sah meskipun cara seperti itu telah mentradisi di kalangan *wulat* (penguasa).⁷⁶

Cara pengangkatan *wazir* (pembantu khalifah) yang disahkan yakni harus dengan pernyataan yang mencakup dua hal pokok yaitu wewenang dan mandat. Jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pada wewenang penuh, tanpa memberikan mandat, hal itu hanya berlaku untuk pengangkatan pengganti imam (khalifah). Sebaliknya, jika sebuah pengangkatan hanya mencakup pemberian mandat saja, tanpa memberikan wewenang penuh, pengangkatan tersebut tidak disahkan. Akan tetapi, jika dalam pengangkatan tersebut sudah mencakup dua hal pokok tersebut, barulah dapat dinyatakan sah dan sempurna.⁷⁷

⁷⁶ Imam Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 45-46

⁷⁷ *Ibid.*, h. 47



B. Dasar Hukum Wazir

Kata “wazir” dalam Al-Quran disebutkan di dalam QS.Thaha : 29-30 yang berbunyi:

وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (٣٥) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (٣٦) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٧)

Artinya:

29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu(wazir) dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku, 31.teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, 32. dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku.”⁷⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas, yakni ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir’aun. Selanjutnya, pada QS. Al-Qiyamah:11) yang berbunyi:

وَزَرَّ طَلَاكًا

Artinya: “Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!”

Menurut pendapat para ulama, salah satu arti dari kata *wazir* yang diambil dari kata *al-wazar* ialah tempat berlindung.⁷⁹

⁷⁸ Djazuli, *op. cit.*, h. 77-78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jika Allah menghendaki pada seseorang amir (pemimpin) menjadi jelek, Allah membuat untuknya *wazir* (pembantunya) yang jelek pula. Hal ini dikemukakan dalam Hadist berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ ، إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنِّهُ » . رواه أبو داود

Artinya: “Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallah anhu berkata : “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bersabda yang maksudnya: “Apabila Allah itu menghendaki kepada seseorang amir (penguasa Negara) menjadi baik, maka Allah membuat untuk *wazir* (pembantu) yang benar. Jikalau amir itu lupa-dari melaksanakan kebaikan, maka *wazir* itu mengingatkannya dan jikalau amir itu ingat-untuk melaksanakan kebaikan, maka *wazir* itu memberikan pertolongannya. Tetapi apabila Allah menghendaki kepada seseorang amir menjadi yang selain itu-**yakni menjadi amir yang jelek, maka Allah membuat untuknya *wazir* yang jelek pula.** Jikalau amir itu lupa-dari melaksanakan kebaikan, maka *wazir* itu tidak suka mengingatkannya dan jikalau amir itu telah ingat-untuk melaksanakan kebaikan, maka *wazir* itupun tidak suka memberikan pertolongan padanya.”⁸⁰

⁷⁹ Imam Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 50

⁸⁰Cholis Akbar, “Perintah Mengangkat Pejabat yang Baik”, <https://www.hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/read/2018/02/12/135387/perintah-mengangkat-pejabat-yang-baik.html>, diakses pada 25/12/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Pemahaman tentang *wazir* terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dasar hukum dari Kementerian Negara, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dimana dalam Undang-Undang tersebut, mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian Negara, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.⁸¹ Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang disingkat LPNK, dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) adalah lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPNK yang menangani permasalahan pertanahan ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁸²

C. Wazir Tanfidzi

Wazir Tanfidzi merupakan pembantu khalifah di bidang administrasi yang memiliki wewenang lebih lemah dari pada wazir *tafwidzi*. Pasalnya, kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (khalifah). *Wazir tanfidzi* disini

⁸¹ Bab VI Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

⁸²<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 16/12/2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU

hanyalah sebagai mediator antara imam (khalifah) dan rakyat.⁸³ Adapun tugas dari *wazir tanfidzi* hanyalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (khalifah) agar ia dapat menanganinya sesuai dengan perintah imam (khalifah).⁸⁴

Karena kekuasaan yang terbatas, syarat-syarat untuk menjadi *wazir tanfidzi* relatif lebih longgar.⁸⁵ Ia hanya disyaratkan untuk memiliki sifat-sifat berikut ini:

- a. Amanah. Ia tidak boleh berkhianat terhadap sesuatu yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
- b. Jujur. Baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Apa saja yang disampaikannya dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
- c. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
- d. Tidak suka bermusuhan maupun bertengkar dengan orang lain. Sebab sikap tersebut dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.

⁸³ Imam Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 52

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 170

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Di samping itu, ia menjadi saksi bagi imam (khalifah).
- f. Cerdas dan cekatan. Sehingga semua persoalan dapat diselesaikannya dan dapat juga dijelaskannya secara tuntas tanpa menyisakan kekaburan.
- g. Ia bukan orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak mampu untuk membedakan diantara orang yang salah dan orang yang benar. Hawa nafsu dapat menipu hati dan akal seseorang yang memalingkannya dari kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah saw bersabda, "Kecintaanmu kepada sesuatu dapat membuatmu buta dan tuli." (HR. Abu Dawud).⁸⁶

Adapun perbedaan antara *wazir tafwidzi* dan *wazir tanfidzi* adalah:

1. *Wazir tafwidz* boleh ikut campur dalam peradilan, sedangkan *wazir tanfidz* tidak boleh.
2. *Wazir tafwidz* boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi Negara, sedangkan *wazir tanfidz* tidak boleh.
3. *Wazir tafwidz* dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, sedangkan *wazir tanfidz* tidak memiliki kekuasaan seperti itu.

⁸⁶ Imam Al-Mawardi, *op. cit.*, h. 53-54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Wazir tafwidz* memiliki wewenang untuk menguasai harta Negara dan mengeluarkannya dari baitul mal, sedangkan *wazir tanfidz* memiliki wewenang tersebut.⁸⁷

⁸⁷Djazuli, *op. cit.*, h. 78



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam melakukan penertiban tanah terlantar dirasa kurang optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya jumlah tanah yang terindikasi terlantar di Provinsi Riau. Apalagi Kantor BPN RI baru mengeluarkan 1 (satu) SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 10/PTT/BPN RI/2012 tentang penetapan tanah terlantar atas Tanah Hak Guna Usaha Nomor 03 nama PT. Alfa Glory Indah yang terletak di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Dalam melakukan penertiban tanah terlantar, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Adapun Upaya Penertiban Tanah Terlantar antara lain Inventarisasi tanah terindikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, Peringatan terhadap pemegang hak dan Penetapan tanah terlantar.

Beberapa kendala yang menjadi temuan sehubungan dengan upaya dalam melakukan penertiban tanah terlantar ialah: *Pertama, Kendala Intern* (dari pihak BPN) yang meliputi Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Terbatasnya dana. *Kedua, Kendala ekstern* (dari masyarakat/lapangan) diantaranya Lokasi yang



susah dijangkau, Terjadinya konflik masyarakat dan Tidak adanya laporan/informasi dari masyarakat atau kantor pertanahan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, apabila terjadi konflik, penertiban tanah terlantar tidak bisa dilaksanakan. Hal ini menjadi penghambat proses penertiban tanah terlantar yang seharusnya bisa diproses lebih cepat.

Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*, pembahasan ini termasuk kedalam *Fiqih Siyasah Dusturiyah* yang merupakan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya. Dalam konsep *Siyasah Dusturiyah*, terdapat *Wazir* yang merupakan pembantu khalifah untuk menangani urusan pemerintahan. Secara garis besar, *Wazir* terbagi menjadi dua, yakni *wazir tafwidzi* dan *wazir tanfidzi*. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat disamakan kedudukannya dengan *wazir tanfidzi* yang merupakan pembantu khalifah di bidang administrasi. Dalam Islam, tanah terlantar/mati disebut dengan *al-ard al-mawat*. Adapun cara menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*) dapat dengan cara memberi batas pada lahan mati, membajaknya dan mengairi lahan mati tersebut. Apabila digunakan untuk bangunan, dapat dengan membuat atap di atas tanah tersebut. Sedangkan, proses penertiban tanah mati dalam Islam hampir sama dengan Hukum Nasional yakni sama-sama diberi waktu 3 (tiga) tahun setelah tanahnya diberikan oleh pemerintah (*iqta'*). Apabila dalam jangka waktu tersebut, pemegang hak tidak bisa mengurus, merawat atau mengelola tanahnya maka pemerintah akan mengambil kembali tanahnya tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biaya rampasan. Hanya saja dalam Hukum Nasional, penertiban tanah terlantar melalui proses yang sangat panjang sebelum sampai tahap penetapan tanah terlantar.

Tentu diperlukan solusi maupun kebijakan guna menangani permasalahan ini. Hal ini tidak akan terlepas dari koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Terutama pemerintah yang harus lebih memberikan pemahaman khususnya mengenai tanah terlantar, guna mengoptimalkan upaya dalam melakukan penertiban tanah terlantar. Sehingga diharapkan dapat terwujud kesejahteraan rakyat yang diidamkan selama ini melalui kebijakan pertanahan. Selain itu, pejabat yang telah diberikan amanah oleh Allah SWT (dalam hal ini BPN Provinsi Riau) harus mampu bertanggung jawab sepenuhnya dan menjalankan tugas semaksimal mungkin. Karena setiap orang akan diminta pertanggung jawaban atas apapun yang ia lakukan sesuai dengan kedudukan masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah Penulis lakukan terhadap Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Melakukan Penertiban Tanah Terlantar, maka Penulis memberikan saran yaitu:

1. Menurut penulis, salah satu cara yang efektif untuk menangani konflik masyarakat dalam penertiban tanah terlantar adalah dengan membentuk suatu aturan yang jelas yang mengatur tentang penyelesaian konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dapat secara tegas menyelesaikan konflik tersebut.

2. Penulis berharap agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat jika perlu dijadikan agenda kegiatan. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai tanah terlantar sehingga dapat juga berpartisipasi dalam menyelenggarakan penertiban tanah terlantar.
3. Menurut penulis, apabila memang dibutuhkan, agar dapat menambah Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga akan lebih banyak tanah yang terindikasi terlantar ditertibkan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga upaya dalam melakukan penertiban tanah terlantar akan semakin optimal.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Al-Mawardi, Imam. 2014. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.

Jakarta: Qisthi Press

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta

Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika

Baskoro, Wahyu. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan

Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group

Fauzi , Noer. 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi. 1985. *Hukum Tanah Jaminan*

Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan

Tanah. Jakarta: Bina Aksara

Harisudin, Noor. 2019. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Penerbit Buku Pena

Salsabila

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Jakarta: Prenada Media Group

Ismail, Mahli. 2013. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Yogyakarta: Kaukaba

Dipantara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-Juz 30*. Banten : Kalim
- Khoiri, Nispul. 2015. *Ushul Fikih*. Medan: Citapustaka Media
- Koto, Alaidin. 2014. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Mujiburohman, Dian Aries. 2019. *Penegakan Hukum Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawa'id al-fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muwahid. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Press
- Pulungan, J. Suyuti. 2002. *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa
- S Hutagalung, Arie. 2001. *Asas-Asas Hukum Agraria*. Jakarta: UI Press
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumardjono, Maria S.W.. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas
- _____. 2017. *Al-Quran al-Karim (Mushaf Al-Quran dan Tajwid)*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

Jurnal dan Skripsi

Ardiansyah, Fatta Nur. 2017. Skripsi: *“Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingindan Beku di MV Meratus Medan I”*. Semarang: PIP

Fitri, Ria. “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Ilmu Hukum Volume XIII, No. 55, Desember 2011

Halim, Abdul, dkk. “Karakteristik Pemegang Amanah dalam Al-Qur’an”. Jurnal Studial-Qur’an dan Hadis. Vol. 1, No. 2, 2019

Hasanah, Ulfia. “Redistribusi Tanah Terlantar di Propinsi Riau”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 3, September 2014-Januari 2015

Munif, Ahmad. “Ihya’ al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal al-Ahkam Volume 29 No. 1, 2018

Pangiuk, Ambok. “Thya’ Al- Mawat dalam Hukum Islam”. Media Akademika, Volume 25 No. 2, April 2010

Permana, Eko Yulinggar. “Peralihan Hak atas Tanah Akibat Tanah Terlantar (Studi Kasus terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10/PTT-HGU/BPN RI/2012”. Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 Februari 2015

Rosmidah. “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4, April 2010

Saripudin. “Konsep Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Perspektif Reforma Agraria”. Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, No. 22, Agustus 2015

Supriyanto. “Kriteria Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundangan Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, Januari 2010

Zaki Ulya. “Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 4, 6 Mei 2016

Internet

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 25/12/2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, diakses pada tanggal 20/11/2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.nasehatquran.com/2019/05/pengertian-fiqih-menurut-para-ulama.html>, diakses pada 16/12/2020

<https://www.hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/read/2018/02/12/135387/perintah-mengangkat-pejabat-yang-baik.html>, diakses pada 25/12/2020

Wawancara

Wawancara Langsung dengan Ibuk Susiani, S. H selaku Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah

Wawancara Langsung dengan Ibuk Syafrina, A. Ptnh selaku Kepala Sub Bidang Seksi Pengendalian, Penertiban, dan Pendayagunaan Tanah Terlarang

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

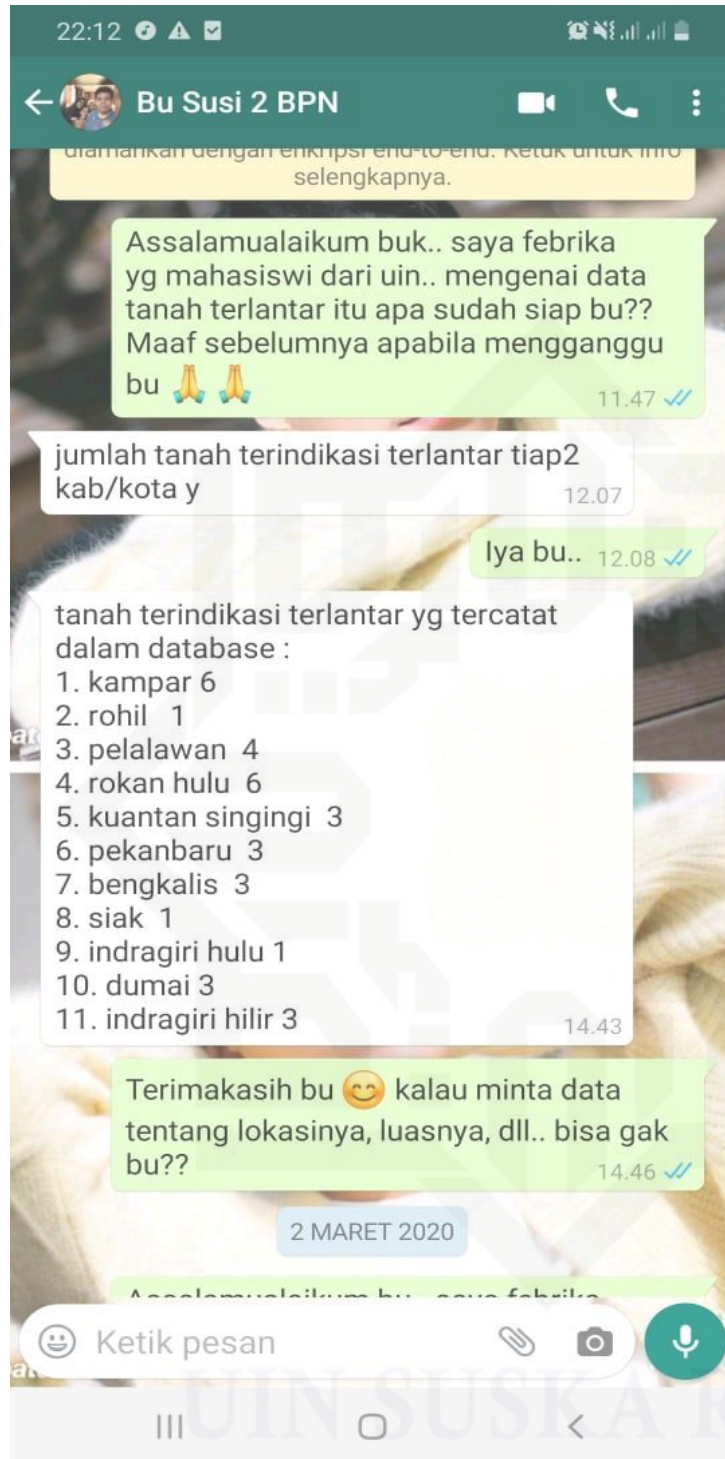
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5504/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FEBRIKA YUNI MAHARANI
NIM : 11624200478
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU DALAM
MELAKUKAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI RIAU
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35088
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5504/2020 Tanggal 28 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

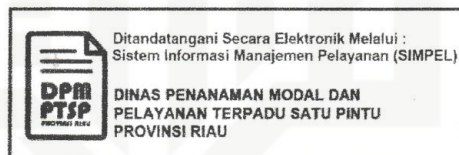
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FEBRIKA YUNI MAHARANI |
| 2. NIM / KTP | : 11624200478 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 September 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pertahanan Nasional Wilayah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Suka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI RIAU**

Jalan Pepaya Nomor 55 Pekanbaru Telp/Faks: 0761-21780, Email: riau@atrbtn.go.id

Nomor : UP.02.03/3275-14/IX/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Riset

Peknbaru, 24 September 2020

Kepada Saudari Febrika Yuni Maharani
di tempat

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/35088 tanggal 04 September perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, bersama ini disampaikan bahwa Saudari :

Nama : Febrika Yuni Maharani
NIM : 11624200478
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang : S1
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Penelitian : Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dalam Melakukan Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah

dapat melaksanakan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan penempatan pada Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Riau,



M. Syahrir, A.Ptnh., S.H., M.M.
NIP. 19620828 198303 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Rektor UIN Suska Riau, di Pekanbaru.

Melayani, Profesional, Terpercaya

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3382



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, nomor Un.04/F.I.I/PP.00.9/9150/2019 tanggal 13 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **FEBRIKA YUNI MAHARANI**
2. NIM : 11624200478
3. Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA BULUH RAMPAI KEC. SEBERIDA-INDRAGIRI HULU
7. Judul Penelitian : **PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN DNA PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
8. Lokasi Penelitian : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 November 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



Drs. M. YUSUF, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650620 199203 1 006

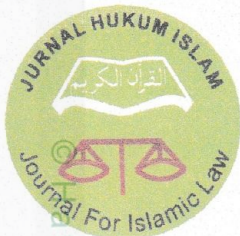
Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : FEBRIKA YUNI MAHARANI
NIM : 11624200478
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI RIAU TERHADAP PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

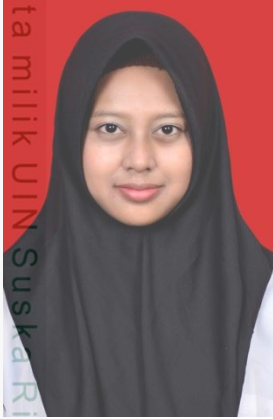
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama **FEBRIKA YUNI MAHARANI** yang lahir pada tanggal 10 Februari 1998 di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari ayah yang bernama (Alm.) Muhadi dan Ibu Siti Komariah.

Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut: tamat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Al Khodijah Serut pada tahun 2002-2004. Sekolah Dasar pada SDN Serut 002 pada tahun 2004-2010. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 1 Kedungwaru tahun 2010-2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Ihsan di Buluh Cina, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu, Riau pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Siyasa pada tahun 2016-2021.

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan magang (PKL) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru pada tahun 2019 dan juga telah melaksanakan pengabdian masyarakat (KKN) di Desa Suka Maju, Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar di bulan Agustus pada tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis melakukan penelitian pada bulan Desember 2019- Februari 2021 dengan judul **“Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau terhadap Penertiban Tanah Terlantar di Provinsi Riau Perspektif Fiqh Siyasah”** di bawah bimbingan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag. Pada tanggal 6 Februari 2021 penulis dimunaqasyahkan dalam siding ujian sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Amin ya rabbal ‘alamin.....